

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan upaya suatu wilayah untuk mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab, sehingga dapat mengelola sumber dayanya secara optimal sesuai dengan kepentingan prioritas, dan potensi yang dimiliki. Tujuan dari otonomi daerah meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi Pembangunan wilayah, pengurangan kesenjangan antar daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efisien dan selaras dengan kebutuhan potensi, dan karakteristik masing-masing daerah (Santosa dkk, 2014).

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 (Sebagaimana telah diubah dengan No. 23 tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang No. 33 tahun 2004 (Sebagaimana telah diubah dengan (No. 1 tahun 2022) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengatur otonomi daerah Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah memiliki dampak langsung terhadap sistem pembiayaan, pengawasan, dan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pembiayaan daerah (Wulandari, 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah anggaran tahunan daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Pemerintah daerah memanfaatkan APBD sebagai dokumen yang mencatat arus pemasukan dan pengeluaran dana selama pelaksanaan otonomi daerah.

Oleh karena itu, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi kebutuhan tahunan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, guna memastikan kelancaran pelaksanaannya serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan dari kapasitas keuangan yang memadai. Kapasitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi keuangan dapat diidentifikasi melalui kinerja keuangan daerah yang dievaluasi menggunakan analisis rasio keuangan daerah.

Menurut Santosa dkk (2014), kinerja suatu kegiatan, program, atau kebijakan dapat diukur berdasarkan sejauh mana kontribusinya dalam mencapai tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi. Sementara itu, menurut Ropa (2016), evaluasi kinerja karyawan dilakukan berdasarkan data yang diperoleh melalui pengukuran kinerja, yang bertujuan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, program, atau kegiatan.

Salah satu metode untuk menilai kinerja pemerintah adalah dengan menganalisis kinerja keuangan yang telah dikelola oleh pemerintah itu sendiri. Pengelolaan keuangan daerah yang optimal akan berdampak positif pada kemajuan daerah. Pengelolaan keuangan yang efektif tidak hanya memerlukan sumber daya manusia yang kompeten, tetapi juga kapasitas keuangan daerah yang memadai. Oleh karena itu, daerah dengan kinerja keuangan yang baik menunjukkan kemampuan dalam membiayai pengelolaan keuangannya. Akuntabilitas tidak hanya mencerminkan kemampuan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memastikan bahwa dana tersebut telah dikelola secara efisien, efektif, dan ekonomis (Sartika, 2019).

Berikut adalah gambaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023 dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1. 1 Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo
tahun 2017-2023**

Tahun	Data	Keterangan					
		Pendapatan daerah	(%)	Pendapatan Asli Daerah	(%)	Belanja Daerah	(%)
2017	Anggaran	1.060.502.746.429,87	95,69	74.975.148.932,52	91,24	898.289.229.721,17	89,69
	Realisasi	1.014.817.095.528,92		68.406.126.027,81		805.634.829.756,30	
2018	Anggaran	1.094.773.542.128,73	100,47	74.528.491.866,00	102,19	945.370.363.340,57	92,96
	Realisasi	1.099.896.407.343,83		76.160.028.617,97		878.860.323.749,78	
2019	Anggaran	1.166.130.657.5151,69	99,24	77.086.096.526,34	107,98	1.016.251.349.596,61	92,03
	Realisasi	1.157.280.009.284,13		83.236.373.472,25		935.252.564.219,17	
2020	Anggaran	1.006.778.093.706,83	101,76	78.612.010.292,83	99,81	949.000.804.009,68	88,82
	Realisasi	1.085.601.955.507,19		78.459.424.382,75		842.932.846.239,48	
2021	Anggaran	1.095.605.289.893,19	106,53	73.682.370.443,44	126,10	1.034.077.136.113,75	93,32
	Realisasi	1.167.195.696.528,30		92.915.275.640,96		964.953.562.563,25	
2022	Anggaran	1.175.676.863.205,00	99,98	95.740.463.914,00	90,01	1.273.038.286.249,00	91,36
	Realisasi	1.175.441.007.742,31		86.173.512.980,31		1.162.988.550.368,00	
2023	Anggaran	1.227.708230.805,00	98,82	96.873.289.659,00	94,73	1.127.587.685.337,00	91,76
	Realisasi	1.213.245.434.539,33		91.771.064.563,33		1.034.622.837.881,55	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023.

Berdasarkan data yang tersedia, persentase pendapatan daerah yang diperoleh dari perbandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan tren yang relatif fluktuatif. Pada tahun 2017, 2019, 2022, dan 2023, terdapat penurunan persentase realisasi pendapatan daerah dibandingkan dengan target anggaran yang ditetapkan. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kondisi ekonomi makro yang kurang mendukung, perubahan kebijakan fiskal pusat maupun daerah, serta tantangan dalam optimalisasi sumber pendapatan daerah. Misalnya, pada tahun 2017 dan 2019, kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya stabil serta adanya perubahan regulasi perpajakan dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023, dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan dan perubahan pola kegiatan ekonomi berkontribusi pada penurunan pendapatan daerah. Di sisi lain, tahun-tahun lainnya menunjukkan kenaikan persentase pendapatan daerah yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan pendapatan dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Sementara itu, jika ditinjau dari kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdapat variasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2017, 2020, 2022, dan 2023, persentase realisasi PAD mengalami penurunan dibandingkan dengan target anggaran. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti lemahnya basis pajak daerah, keterbatasan kapasitas administrasi dalam pemungutan pajak dan retribusi, serta dampak ekonomi yang menekan kemampuan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak daerah. Tahun 2020, khususnya, merupakan masa yang sangat menantang karena pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan, sehingga berdampak langsung pada penerimaan PAD. Sementara itu, tahun-tahun lain yang menunjukkan kenaikan persentase PAD mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi serta kebijakan daerah yang lebih responsif terhadap potensi pendapatan asli.

Di sisi lain, belanja daerah juga menunjukkan pola yang relative konsisten namun cenderung di bawah angka 100%, yang mengindikasikan bahwa terdapat sisi anggaran yang tidak terserap secara optimal. Pada tahun 2017, 2020, 2022, dan 2023, persentase realisasi belanja daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun lainnya. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, seperti penyesuaian anggaran akibat penurunan pendapatan, efisiensi belanja, serta kebijakan penghematan yang diterapkan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Tahun 2020 dan 2022, misalnya, merupakan periode di mana pemerintah daerah harus menyesuaikan belanja akibat dampak pandemi yang mempengaruhi pendapatan daerah dan kebutuhan untuk mengalokasikan dana pada sektor kesehatan dan bantuan sosial. Penurunan belanja daerah pada tahun-tahun tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan fiskal serta mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada.

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa anggaran belanja dan transfer daerah Pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2022 dianggarkan lebih besar yaitu Rp 1.448.960.037.377,00 dibandingkan dengan anggaran pendapatan hanya dianggarkan sebesar Rp. 1.175.676.863.205,00

Tabel 1. 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2017-2023

Tahun	APBD		Surplus/Defisit
	Anggaran Pendapatan	Anggaran Belanja dan Transfer	
2017	1.060.502.746.429,87	1.060.438.024.011,25	64.722.418,62
2018	1.094.773.542.128,73	1.112.917.035.840,65	(18.143.493.711,92)
2019	1.166.130.657.515,69	1.200.922.154.196,69	(34.791.496.681,00)
2020	1.066.778.093.706,83	1.127.874.864.709,68	(61.096.771.002, 85)
2021	1.095.605.289.893,19	1.216.021.630.431,75	(120.416.340.538,56)
2022	1.175.676.863.205,00	1.448.960.037.377,00	(273.283.174.172,00)
2023	1.227.708.230.805,00	1.317.005.678.373,00	(89.297.447.568,00)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023

Pada table 1.3 dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 terjadi surplus paling besar, yakni Rp. 63.818.624.536,71 yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan lebih besar daripada realisasi belanja dan transfer. Sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 mengalami defisit dikarenakan realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja dan transfer.

Tabel 1. 3 Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2017-2023

Tahun	APBD		Surplus/Defisit
	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja dan Transfer	
2017	1.014.817.095.528,92	967.651.766.130,38	47.165.329.398,54
2018	1.099.896.407.343,83	1.046.282.914.606,86	53.613.492.736,97
2019	1.157.280.009.284,13	1.119.835.547.427,17	37.444.461.856,96
2020	1.085.601.955.507,19	1.021.783.330.971,48	63.818.624.536,71

Tahun	APBD		Surplus/Defisit
	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja dan Transfer	
2021	1.167.195.676.528,30	1.145.760.283.465,25	21.435.393.063,05
2022	1.175.441.007.742,31	1.338.826.631.206,07	(163.385.623.463,76)
2023	1.213.245.434.539,33	1.223.970.584.023,55	(10.725.149.484,22).

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2020-2023

Realisasi suatu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo mengindikasikan keberhasilan jika dilihat dengan adanya suatu ukuran. Karena pengukuran kinerja keuangan merupakan sarana yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan dan mengevaluasi kemajuan organisasi serta tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran, maka pengukuran kinerja keuangan menjadi suatu hal yang mutlak dilakukan. Sebagai organisasi sektor publik yang melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo berkewajiban untuk memiliki proses penyusunan program dan anggaran yang baik dan didukung oleh kualitas kinerja aparatur pemerintah sebagai konsekuensi dari ketersediaan dana yang ada, dengan harapan bahwa akuntabilitas publik akan dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah sebagai hasilnya. Hal ini menjadi argumen yang kuat untuk melakukan investigasi terhadap Pemerintah Kabupaten Tebo secara detail.

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai analisis rasio keuangan menunjukkan hasil yang beragam. Dalam menilai kinerja keuangan daerah, sejumlah peneliti telah menganalisisnya dengan menggunakan indikator seperti rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pilat & Morasa (2017), Sartika (2019), Mulyaningsih & Sunaningsih (2022), Drastiana & Himmati (2021), serta Ropa (2016), Rasio kemandirian keuangan daerah tergolong dalam kategori instruktif. Sementara itu, hasil penelitian Purwanti & Noviyanti (2021), Marliani (2022),

Wulandari dkk (2023), dan Sharini dkk (2024) menunjukkan bahwa rasio tersebut berada dalam kategori konsultatif. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Maulina & Rhea (2019) mengklasifikasikan rasio ini sebagai partisipatif. Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar daerah masih berada dalam kategori instruktif, yang mencerminkan dominasi pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Merujuk pada penelitian Pilat & Morasa (2017), Maulina & Rhea (2019), Ramadhani dkk (2019), Sartika (2019), Marliani (2022), Mulyaningsih & Sunaningsih (2022), serta Wulandari dkk (2023), dan Sharini dkk (2024), Rasio efektivitas PAD dikategorikan efektif. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Purba & Silitonga (2022) serta Purwanti & Noviyanti (2021) mengindikasikan bahwa rasio tersebut tergolong kurang efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Marliani (2022), Maulina & Rhea (2019), Mulyaningsih & Sunaningsih (2022), Pilat & Morasa (2017), Purba & Silitonga (2022), Purwanti & Noviyanti (2021), Ramadhani dkk (2019), Sartika (2019), Sharini dkk (2024), serta Wulandari dkk (2023) menyimpulkan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah termasuk dalam kategori efisien.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Marliani (2022), Maulina & Rhea (2019), Mulyaningsih & Sunaningsih (2022), Pilat & Morasa (2017), Purba & Silitonga (2022), Purwanti & Noviyanti (2021), Ramadhani dkk (2019), Sartika (2019), Sharini dkk (2024), serta Wulandari dkk (2023) menunjukkan bahwa Rasio keserasian mencerminkan ketidakseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal belum terwujud secara optimal. Hingga saat ini, belum ada standar pasti mengenai proporsi ideal belanja operasional dan belanja modal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengingat perbedaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika pembangunan serta kebutuhan investasi yang diperlukan guna mencapai target pertumbuhan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maulina & Rhea (2019), Purwanti & Noviyanti (2021), Ramadhani dkk (2019), Mulyaningsih & Sunaningsih (2022), Mandua dkk (2023), Wulandari dkk (2023), serta Pundissing

& Pagiu (2020), Rasio pertumbuhan menunjukkan fluktuasi. Penurunan yang terjadi dalam suatu periode menyebabkan pendapatan yang diterima pemerintah daerah tidak optimal. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa pemerintah belum sepenuhnya memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti suatu topik dengan judul penelitian **“Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo jika dilihat dari Rasio Keserasian?
5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Tebo jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Tebo jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Tebo jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
4. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Tebo jika dilihat dari Rasio Keserasian
5. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Tebo jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti dalam penelitian ini yaitu dapat menambah wawasan tentang analisis kinerja keuangan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Tebo

Dari hasil penelitian merupakan masukan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah agar laporan keuangan di tahun berikutnya lebih baik lagi

3. Bagi Perkembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis pada pengembangan teori mengenai pengukuran kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya,